

## **Analisis Pengelolaan Aset Tetap di Kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**

Aminah harahap<sup>\*1</sup>, Rahmat Daim Harahap, M.Ak<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371*

e-mail : [aminahharahap31@gmail.com](mailto:aminahharahap31@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id) <sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintah, karena aset tetap mampu berperan krusial (penting) sebagai unsur penunjang dalam melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan produktivitas instansi. Jenis dan jumlah Aset tetap di forum publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif data diperoleh dengan observasi, wawancara, Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan belum dilakukan dengan maksimal dan belum sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum melakukan haknya dengan baik, pengamanan yang belum maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor Sistem IT, SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap.

*Kata Kunci : Aset Tetap, Milik Daerah, Siklus Pengelolaan*

### **1. Latar Belakang**

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintah, karena aset tetap mampu berperan krusial (penting) sebagai unsur penunjang dalam melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan produktivitas instansi. Jenis dan jumlah Aset tetap di forum publik. Siklus pengelolaan aset permanen berdasarkan Jurnal (Saadah & Priyono, 2020) adalah rangkaian kegiatan proses pengelolaan aset tetap yang artinya tindakan konkret terhadap wilayah yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nasional, dalam hal ini Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi bidang Manajemen Aset merupakan menyelenggarakan administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak menjadi asisten manajer. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasan, 2019) Pengelolaan harta benda yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah harus dikendalikan dengan prinsip-prinsip praktis, kepastian hukum, transparansi, efikheparitnie, akuntabilitas. Negara-negara lain dalam pemerintahan harus fokus pada prinsip untuk mengelola aset tetap. Manajemen aset adalah proses mengelola pengeluaran aset modal pemerintah daerah secara efisien, termasuk siklus hidup atau analisis kapasitas setiap aset dan informasi pemeliharaan, permintaan standar layanan aset, dan analisis aset. Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara ialah Instansi resmi Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Dinas TenagaKerja Provinsi Sumatera Utara, sebagai instansi yang berwenang pada bidang pelatihan, penempatan energi kerja, serta proteksi energi kerja di Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokok Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan asalah menjadi instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan serta transmigrasi di wilayah kerjanya.

Pengelolaan aset tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu hal terpenting dalam pengelolaan pemerintahan daerah saat ini, dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta mewujudkan akuntabilitas

publik. Selain itu, Manajemen Sumber Daya memberikan referensi bahwa sumber daya daerah harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung fungsi normal layanan utama untuk Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Ka.Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Septinawati Naipospos, S.h merupakan satuan kerja yang memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja Sekretariat dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional sehingga dapat memberikan perkembangan yang baik dan manfaat pembangunan yang dapat dicapai. Dengan pengelolaan aset yang baik maka Ka.Sub Bagian Tata Usaha Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara dapat menjalankan kegiatan organisasi dengan baik dan efektif, sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada Masyarakat.

Masalah saat ini di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara pada subsektor aktiva tetap pada bagian penggunaan Sebagai contoh, Bangunan yang seharusnya tidak dibangun malah dibangun untuk tidak digunakan, dengan itu ini menyebabkan pemborosan biaya yang tidak terlalu penting, tidak hanya itu, aset tetap seperti Mobil kantor pun di beli dan tidak digunakan hanya dibiarkan terparkir di depan kantor begitu saja padahal di dalam mobil terlihat masih bagus dan layak guna, dalam hal penatausahaan atau pencatatan tentang pembukuan aset tetap masih banyak pencatatan yang tidak di perbaharui, seperti ada di dalam laporan Jumlah Barang Inventaris Tahun 2021 di ruangan K3 di pembukuan terdapat kursi besar hitam, kursi biru besar tetapi kenyataan di lapangan barang ini tidak ada. Dan penulis telah melakukan penelusuran lebih lengkap di lapangan dengan melakukan wawancara dengan staff bagian K3, memang benar bahwa aset tersebut telah lama rusak tetapi bagian tata usaha tidak melakukan pembaharuan pencatatan aset tersebut. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti dengan Ibu Septinawati Naipospos, S.h bahwa Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara masih mendapatkan kendala, seperti masalah pencarian aset masa lalu, aset rusak atau tidak digunakan lagi. Dengan permasalahan yang ada, seharusnya kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah pengelolaan untuk mengelola kekayaan teritorial secara fisik, prosedur administratif serta hukum pemeriksaan properti teritorial oleh otoritas yang berwenang yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi atau Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kota Medan.

## **2. Kajian Pustaka**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah adalah nilai tukar atau modal dari harta kekayaan. Dalam Aset ini, barang milik negara dikelola oleh organisasi anggota yang mengawasi pendapatan dan belanja daerah atau perolehan legal lainnya, (Meiliana & Febriyanti, 2019) maka dapat disimpulkan bahwa setiap aset daerah yang diperoleh dari APBD, dari pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah dan kemudian dikelola oleh suatu organisasi yang mempunyai anggota untuk mengendalikan organisasi tersebut untuk memahami manajemen satu-satunya hal yang dipahami oleh sedikit orang. Karena ada kesamaan tujuan antara tujuan manajerial dan tujuan organisasi. Barang tersebut disebut barang milik daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi: (Purba, 2019)

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Keamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan

## 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Aset tetap memiliki karakteristik, setiap aset dimiliki untuk keperluan industri dan tidak dijual. Hanya aset yang digunakan dalam kegiatan bisnis normal yang dianggap sebagai aset tetap. Misalnya, bangunan kosong (tidak terpakai) diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi dan aset tetap dalam penyimpanan diklasifikasikan sebagai investasi. Aset tersebut memiliki masa manfaat yang panjang dan umumnya disusutkan. Aset memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Entitas mengalokasikan biaya investasi aset ke beban penyusutan untuk periode mendatang. Pengecualian berlaku untuk tanah yang disebabkan, misalnya, oleh hilangnya kesuburan tanah karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan atau erosi tanah. Aset tetap adalah aset berwujud yang dicirikan oleh kehadiran fisik atau berwujudnya. Ini membedakan properti, pabrik dan peralatan dari aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Tidak seperti komoditas, aset tetap bukanlah bagian dari produk yang akan dijual kembali. Klasifikasi Aset Tetap, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi perusahaan. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: (Rokhmadi, Baga, & Ristiyanto, 2018)

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan irigasi dan Jaringan
- 5) Aset Tetap lainnya
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. (Fadli, 2021) Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang khusus dan menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu melakukan wawancara langsung kepada pihak Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, pada sub.bidang Tata Usaha yang mengelola aset tetap pada Badan Pengelolaan Aset Tetap dan penelitian kepustakaan (Library Reaserch) yaitu dalam penelitian peneliti mengumpulkan dokumen, data dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh informasi untuk menyebarluaskan berbagai gambaran dan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah sumber daya tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah 1 provinsi Sumatera Utara.

## Obyek Penelitian dan Responden

Obyek dari penelitian ini adalah Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Jl. William Iskandar No.331, Sidoarjo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Responden diambil dari 1 orang yang berkopeten di bidangnya yaitu Ibu Septinawati Naipospos, S.H selaku Pembimbing di Perusahaan serta menjabat sebagai Kasie. Sub Bagian Tata Usaha.

## Sumber Data

Dua jenis informasi diperlukan untuk penelitian ini.

- 1) Informasi primer, informasi yang diterima secara langsung. Tergugat atau barang yang diperiksa atau yang berhubungan dengan barang yang diperiksa. Informasi dikumpulkan Responden langsung

tentang efektivitas pengelolaan aset Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.

2) Informasi sekunder, informasi yang diterima dari suatu instansi.

Informasi tentang pertanyaan penelitian (instansi terkait) dapat ditemukan di dokumen kertas kerja dari Ka.Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara yaitu ibu SEPTINAWATI NAIPOSPOS, SH.

**Tabel 1.1 Jumlah Barang Inventaris Tahun 2021 di Upt PK Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara  
RUANGAN KA.TU**

NO	NAMA BARANG	MEREK/TIPE	JMLH	NOMOR INVENTARIS BARANG	JUMLAH
1	Meja Besar		1		1
2	Buffet		1		1
3	Lemari		1		1
4	Kursi Besar		3		1
5	Kursi Sofa		1 Set + Meja		1
6	Laci Mini		1		1
7	AC		1		1
	<b>TOTAL SELURUHNYA</b>		<b>9</b>		<b>9</b>

**RUANGAN TATA USAHA (TU)**

NO	NAMA BARANG	MEREK/TIPE	JMLH	NOMOR INVENTARIS BARANG	JMLH
1	Lemari	Acero 1 tanpa merek	1 1	7301100192200502010193 5	2
2	Meja	Viktor Kelly Torix Meja besar	4 1 1 3		9
3	Kursi	Chitose Future Warna biru Warna hitam besar	5 8 2 2		17
4	Buffet	Victor Buffet besar	2 2	730110019220500110	4
5	Billing cabinet	Acero	1		1
6	Computer	Lenovo Hp	1 1		2
7	Printer	Epson / LVO Capson MIX 377	1 1		2
8	Mobil dinas	Toyota ( kijang inova )	1	BK 1566 L	1
9	Sepeda motor dinas	Honda Vario	1		1
10	Kipas angin	Maspion / Ex11691	1		1
	<b>TOTAL SELURUHNYA</b>		<b>40</b>		<b>40</b>

**RUANGAN PENEGAK HUKUM (PK)**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>MERЕК/TIPE</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NOMOR INVENTARIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Meja	Viktor	2		12
		Expo	3		
		Meja besar	1		
		Meja kayu	6		
2	Kursi	Chitose	7		21
		Kursi kayu	1		
		Kursi hitam kecil	1		
		Kursi coklat kecil	1		
		Kursi besar biru	5		
		Kursi kecil besar	6		
3	Lemari	Lemari kayu besar			1
4	Billing gabinet	Lion			1
5	Computer	Lenovo			1
6	Printer	Epson			1
<b>TOTAL SELURUHNYA</b>					<b>37</b>

**RUANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>MERЕК/TIPE</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NOMOR INVENTARIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Meja	Viktor	6	730110019220502010490 730110018220502104349	14
		Kelly	1		
		Meja besar	2		
		Meja kayu	5		
2	Kursi	Chitose	1		18
		Sapporo	4		
		Warna coklat	5		
		Biru kecil	2		
		Biru besar	4		
		Ichiw			
		Kursi kayu	1		
		Kursi besar hitam	1		
3	Lemari	Acero	1		1
4	Computer	Lenovo / L331	1		1
5	Printer	Epson / L3310	1		1
<b>TOTAL SELURUHNYA</b>			<b>35</b>		<b>35</b>

#### 4. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1.2 Pertanyaan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1	Bagaimana proses pengelolaan aset tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara?	Sumber :Ka.Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara
2	Apakah terdapat kendala terkait Pengelolaan Aset Tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara ?	Sumber :Ka.Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara

Hasil wawancara Ka.Sub Bagian Tata Usaha dengan penulis dalam proses Pengelolaan Aset Tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Pedoman Manajemen Properti yang Digunakan oleh Otoritas Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu :

##### **Perencanaan dan Penganggaran**

Tentunya perencanaan di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang memungkinkan pegawai menjadi lebih profesional dan unggul dalam bekerja. Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) mencantumkan kebutuhan perencanaan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di wilayah yang ada. Anggaran berikutnya akan mendapat dana khusus untuk pengelolaan kekayaan daerah.

##### **Pengadaan**

Pengadaan aset teritorial di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Badan pemeriksaan keuangan daerah (BPKAD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

##### **Penggunaan**

Penggunaan aset yang terjadi pada Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Belum berjalan dengan baik. Karena belum memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset tetap/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

##### **Pemanfaatan**

Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai. Hal ini dilihat dari dokumen sumber dan pernyataan dari hasil wawancara oleh Bidang Ka.Sub Bagian Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemanfaatan Aset tetap disini itu hanya Pinjam pakai, saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai” Namun menurut penulis dalam pemanfaatan aset Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Belum melakukan haknya dengan baik. jadi belum sesuai dengan aturan yang terkait dalam Permendagri No.19 tahun 2016.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan Kantor Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Belum melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum yang belum maksimal terlaksana. akan tetapi Kepala Dinas telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga. Setelah itu dalam pemeliharaan dilakukan pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah oleh badan akreditasi seperti BPKAD Kota Medan, dan menurut penulis masih belum berjalan dengan baik.

### **Penilaian**

penilaian aset yang dilakukan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dikarenakan dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

### **Pemindahtanganan**

Kegiatan penyerahan atau pemindahtanganan aset terlebih dahulu melakukan penyerahan mobil ataupun motor ke Dinas Ketenagakerjaan selanjutnya ke Pemerintah Daerah. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemindahtanganan yang dilakukan oleh Kantor Di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara

### **Penatausahaan serta Pembinaan**

Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara sedang mengambil langkah untuk mengumpulkan data tentang kepemilikan lokal dan bimbingan dari supervisor oleh staf di departemen kekayaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat seimbang dan serasi antara data dan fakta. Hal ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk memelihara aset daerah.

### **Pengawasan dan Pengendalian**

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara untuk pengawasan dan pengendalian.

### **Pemusnahan dan Penghapusan**

Pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara prosesnya masih berlangsung, karena masih sulit untuk melacak aset yang ada beberapa tahun terakhir sebagai aset yang hilang atau rusak, sehingga diperlukan sistem informasi. yang dapat digunakan untuk menghapus data aset secara elektronik dan memastikan keamanan penyimpanan data. Maka, pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh Kantor Pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### **Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Tatap**

Faktor penghambat atau penghambat pengelolaan aktiva tetap/properti Daerah Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara

#### **A. Sumber daya manusia**

SDM ini itu adalah hal pertama yang dianggap sebagai faktor pembatas. Mengapa perlunya kesadaran dan pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

#### **B. Komitmen pemimpin**

Faktor komitmen pimpinan ini menjadi kendala. Dikarenakan perlu adanya konsistensi struktur organisasi yang ditetapkan oleh pengurus dan perlu adanya perhatian atau konsistensi seorang pengelola dalam pengelolaan modal tetap barang milik daerah.

### C. Penilaian Aktiva Tetap

Faktor penilaian aset juga menjadi kendala. Terutama penilaian barang yang tidak diketahui. Selain yang ke-3 tersebut, Kurangnya sistem untuk memfasilitasi pengelolaan warisan daerah, kurangnya peraturan daerah tersebut ada satu hal yang termasuk kendala dalam pengelolaan aset tetap, mengenai pengelolaan rinci dalam melakukan proses pengelolaan aset daerah setidaknya satu cadangan dengan sistem IT data dapat disimpan secara online dan elektronik dan keamanan penyimpanan data lebih terjamin, kurangnya staff ahli dalam Pengelolaan Aset yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip pengelolaan itu dengan baik, selain itu pemberian.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan studi ini, peneliti menemukan adanya beberapa masalah dengan manajemen aset tetap. Masalah dengan akses ke real estat di Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Pada tahun-tahun sebelumnya, seperti properti dianggap tidak rusak atau tidak terpakai. Sehingga standar ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 belum di jalankan dengan optimal sebagaimana mestinya khususnya mengenai penggunaan, penatausahaan atau pencatatan tentang pembukuan aset tetap dimana masih banyak pencatatan yang tidak di perbaharui..

## Daftar Pustaka

- Biswan, A. T., & Falaqi, F. (2018, Juni). Praktik Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah/Vol. 6/No. 1* , 39 – 63.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1* , 33-54.
- Hasan, W. A. (2019, April). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 2 Nomor Issn (Print): 2598 - 0696* , 27-38.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 4, No. 2 E-Issn 2581-1002* , 215-236.
- Meiliana, R., & Febriyanti, M. A. (2019, September). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 10, No. 2* , 71-98.
- Purba, R. B. (2019, Februari). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol. 9 No.2 Issn: 2087 - 4669* , 152-164.
- Rokhmadi, F. A., Baga, L. M., & Ristiyanto, N. (2018, Juni). Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 10 Nomor 1* , 48-57.
- Saadah, R. A., & Priyono, N. (2020, Februari ). Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di Bpkad Kota Magelang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi) Volume 6 No.1* , 21-33.